MAHAR FIKTIF DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

RENI ROZALINA

NIM: 13621088

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSYIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
2019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 kode pos 39119

IAIN CURUP IAIN CURUP IAIN CPENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA IIP IAIN CURUPIAIN CURUPIAIN Nomor: A 153 /In.34/F.SEI/I/PP.00.9/ /2019

Nama AIN CURI : Reni Rozalina Nim IAIN CURL : 13621088

Fakultas N CURL: Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi AIN CURL Ahwal Al-Syakhsyiyah

Judul AIN CURUP Mahar Fiktif dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif

Telah dimunaqasyahkan dalam siding terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/ Tanggal: Kamis, 29 Nopember 2019

Pukul : 11.00 - 12.30 WIB.

IAIN CURUP IAIN CURUP IAIN IAIN CURUP IAIN CURUP IAIN

Tempat Ruang 1 Gedung Munaqasah Syariah IAIN Curup

IAIN C Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana UP All C Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syariah.

URUP IAIN CURUP IAIN CU

IAIN CURUPIAIN CM Abu Dza

IAIN CURUP IAIN NIP. 19781009 200801 1 007URUP

NIP.19780517 201101 2 009 AIN CURUP

Mengesahkan

ERIANDekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Reni Rozalina

Nomor Induk Mahasiswa: 13621088

Jurusan

: Syari'ah dan Ekonomi Islam

Program Studi

: Ahwal Al- Syakhsyiyah

Judul

: "Mahar Fiktif Dalam Pandangan Hukum Islam dan

Hukum Positif"

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukam orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lai, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan sepenuhnya.

Curup,

November 2018

Penulis

Reni Rozalina

NIM: 13621088

MOTTO

KESUKSESAN ADALAH DIMANA SAAT PERSIAPAN DAN KESEMPATAN BERTEMU

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Mha Pengasih Lagi Maha Penyayang serta dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini sebagai rasa sayang dan terima kasih ku kepada:

- * Teristimewa Ayahanda tercinta ALM. Suhedi Hermawan dan Ibunda tercinta Yurnalis, terima kasih yang tiada terhingga yang telah memberikan pengorbanan, didikan, dan do'a kepada ananda dalam menempuh kehidupan ini.
- * Semua Kakak-kakak ku terima kasih atas semuanya yang telah memotivasi penulis dalam menempuh kehidupan ini.
- Kepada Anggi Nirwansyah yang telah memberikan motivasi dan menemani penulis dalam menyelesaikan penilisan skripsi ini.
- * Rekan-rekan dan sahabat penulis, Martalia Wijaya, Ridwan Saputra, Rani, Rudi Purnomo, Abdurrahman Al Abid, dan teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya baik berupa saran, dan ideidenya selama ini.
- Agama, Bangsa dan Almamater ku IAIN Curup.

MAHAR FIKTIF DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

RENI ROZALINA

Nim: 13621088

Abstrak: Yang menjadi latar belakang dalam penulisan ini bahwa mahar fiktif merupakan suatu pernikahan yg dimana maharnya ditambahkan oleh pihak calon istri yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui penyebab terjadinya mahar fiktif dan menurut hukum Islam dan hukum positif tentang mahar fiktif. Penulisan karya tulis ini bertujuan untuk memaparkan tentang mahar fiktif dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif. Pernikahan dengan mahar yang ditambahkan atau dapat disebut juga dengan mahar fiktif sekarang ini sudah mulai terjadi di Indonesia.

Dalam penulisan karya tulis ini penulis menggunakan jenis penelitian perpustakaan (library research) dan sumber dengan metode mengumpulkan data-data. Secara umum penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian deskritif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Sehingga dalam temuan penulis, setidaknya ada beberapa hal yang penulis paparkan tentang mahar fiktif atau mahar yang ditambahkan oleh calon istri, bahwa dalam islam mahar yang ditambahkan oleh calon istri itu di perbolehkan. Kebolehan tersebut dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, calon istri melakukan hibah berupa harta atau barang kepada calon suami. Kedua, mahar itu adalah hak dari istri. Maka, istri boleh memberikannya balik pada suaminya yaitu sebagai hibah. Salah satu penyebab terjadinya mahar fiktif ini dikarenakan atas ketidak mampuan pihak laki-laki atau calon suami untuk memenuhi pemberian jumlah mahar yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sejak awal, sehingga pihak calon istri menambahkan jumlah mahar yang akan di berikan. Adapun kesimpulan nya adalah: 1) penyebab terjadinya mahar yg ditambah ini adalah karena rasa malu dari pihak calon suami karena tidak dapat memenuhi kesepakatan awal. 2) menurut hukum islam mahar tidak termasuk dalam syarat dan rukun suatu pernikahan, begitu juga menurut hukum positif, karena mahar bukan merupakan rukun dalam akad nikah, sebagaimana disebut dalam kitab-kitab fikih rukun nikah hanya ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul. Dan dalam KHI pasal 14 yaitu rukun dan syarat suatu perkawinan ada lima, calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul.

Kata kunci: Mahar, Hukum Islam, Kompilasi Hukum Perkawinan Islam

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha luas ilmu-Nya, berkat Rahmat dan Hidayahnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada penyandang Uswatun Hasanah dan pembawa cahaya pada kehidupan kita yaitu Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga dan sahabat hingga akhir zaman.

Adapun tujuan penulis karya tulis ilmiah ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari semua bantuan, motivasi dan bimbingan dari semua pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan ribuan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada:

- 1. Selaku Rektor IAIN Curup Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M.Ag,.MPd.
- Bapak Dr. Yusefri, M.Ag., Selaku Dekan Jurusan Syaria'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
- 3. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc.M.A., selaku penanggung jawab kependidikan Ahwal Al Syakhsyiyyah.
- 4. Bapak M Abu Dzar, Lc.M.H.I., selaku Pembimbing I, yang telah membimbing dan mengarahkna penulis dalam pembuatan skripsi yang baik dan benar.
- 5. Bapak Budi Birahmat, MIS., selaku Pembimbing II, yang juga telah membantu dalam mengarahkan penulisan skripsi ini.
- 6. Kepada seluruh Dosen di lingkungan kampus terutama jurusan Syari'ah Prodi Ahwal Al-Syakhsyiyah yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama belajar di IAIN Curup.

Semoga segala amal baik dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dapat

menjadi amal sholeh dan akan mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Selanjutnya dengan semua kerendahan hati penulis mengharap kritik dan saran

yang konstruktif demi kebaikan skripsi ini, dan penulis berharap skripsi ini dapat

bermanfaat bagi pembaca dan generasi selanjutnya.

Curup, 2018

Penulis,

RENI ROZALINA

NIM: 13621088

viii

DAFTAR ISI

Hal	
HALAMAN JUDUL i	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBINGii	
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASIiii	
HALAMAN MOTOiv	
HALAMAN PERSEMBAHANv	
ABSTRAKvi	
KATA PENGANTARvii	
DAFTAR ISIix	
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah B. Rumusan Dan Batasan Masalah C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian D. Metode Penelitian E. Sistematika Penulisan	
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Pernikahan Dalam Islam B. Mahar C. Hibah	
BAB III. MAHAR DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	
A. Hukum Islam B. Hukum Positif	
BAB IV. HASIL PENELITIAN	
A. Penyebab Terjadinya Mahar FiktifB. Mahar Fiktif Menurut Hukum Islam	

BAB V. PENUTUP

A.	Kesimpulan
B.	Saran-Saran

Daftar Kepustakaan

Lampiran-Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya adalah sebagai makhluk sosial dimana sifat yang harus ada yaitu adalah sifat yang saling membutuhkan, karena sejak lahir manusia dilengkapi dengan naluri untuk senantiasa hidup dengan orang lain. Naluri untuk hidup bersama dengan orang-orang lain mengingatkan hasrat yang kuat untuk menjalankan hidup yang tentram dan damai. Allah menjadikan makhluknya berpasang-pasangan menjadikaan manusia laki-laki dan perempuan. Dalam menjalankan kehidupan manusia tentu ingin melanjutkan keturunan. Oleh karena itu manusia harus mengikatkan diri dengan pasangannya melalui ikatan perkawinan.

Dalam perkawinan yang sah harus adanya mahar untuk memenuhi syarat sahnya perkawinan. Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai perempuan, baik berbentuk barang, uang atau jasa, yang tidak bertentangan dengan hukum islam.¹

Mahar dalam fiqh merupakan salah satu syarat kesahihan pernikahan. Calon suami wajib memberikan mahar kepada calon istrinya. Mahar merupakan hak pihak

1

¹ Ahmad Rofig, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: 1995), hal. 101

mempelai perempuan dan siapapun, termasuk orang tua dilarang menginterventasi hak individu tersebut.²

Menurut Undang-Undang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 1 bagian D mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa, yang tidak bertentangan dengan hukum islam.³

Mahar bukanlah harga seperti menjadi sesuatu, tetapi kaitan moral antara suami, istri, dan walinya. Oleh sebab itu sebaliknya jumlahnya tidak terlalu banyak, agar banyak laki-laki yang mau menikah.

Mahar dalam fiqh merupakan salah satu syarat kesahihan pernikahan. Calon suami wajib memberikan mahar kepada calon istrinya. Mahar merupakan hak pihak mempelai perempuan dan siapapun, termasuk orang tua dilarang menginterventasi hak individu tersebut.

Mahar itu sendiri memiliki ukuran, Fugaha' sepakat bahwa mahar tidak memiliki ukuran batas yang harus dilakukan dan tidak boleh melebihinya. Ukuran mahar diserahkan kepada kemampuan suami sesuai dengan pandangannya yang sesuai.

Abdul Aziz Muhammad Azzam, fiqh munakahat, (Jakarta: Amzah, 2009), hal. 174.
 Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara), h. 323

Tidak ada dalam syara' suatu dalil yang membatasi mahar sampai tinggi dan tidak boleh melebihinya. Sebagaimana dalam firman allah QS. An-nisa' ayat 20-21 :

20. dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?21. bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul(bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.⁴

Maksudnya Ialah: menceraikan isteri yang tidak disenangi dan kawin dengan isteri yang baru. Sekalipun ia menceraikan isteri yang lama itu bukan tujuan untuk kawin, Namun meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan.

Sekalipun fuqoha' sepakat bahwa tidak ada batas maksimal dalam mahar, tetapi seyogianya tidak berlebihan, khususnya diera sekarang. Hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW bersabda:

_

⁴ Departemen Agama R.I, *Al-qur'an dan terjemah*, (Bandung: Jumanatul'ali-Art, 2004), h. 77

عَنْ عَائِشَةَ رض أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ص قَالَ: إنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَثُوْنَةً. احمد

Dari 'Aisyah RA, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Nikah yang paling besar berkahnya yaitu yang paling ringan maharnya". (HR. Ahmad).⁵

Masalah jenis barang yang dapat digunakan untuk mahar, bisa berupa sesuatu yang dapat dimiliki atau diambil manfaatnya, juga dapat dijadikan pengganti atau ditukarkan.

Adapun mengenai macam-macamnya, ulama fikih sepakat bahwa mahar itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Mahar musamma

Mahar musamma yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.

2. Mahar mitsil (sepadan)

Mahar mitsil yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya.⁷

119.

⁵ K.H.Kahar Masyhur, *Bulughul Maram Buku ke Dua*, Jakarta, 1992, h. 179-180

⁶ Umar Sulaiman Al-Asygar, *Pernikahan Syar'I*, Cet1, h.289

⁷ Slamet Abidin – Aminudin, *Fiqih Munakahat1*, Cet1, (Jakarta:Cv Pustaka Setia,1999), h.116-

Dari kesimpulan diatas, dapat disimpulkan bahwa mahar adalah pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak mempelai perempuan berupa harta atau manfaat karena adanya ikatan perkawinan. Dasar hukum adanya mahar dalam perkawinan terdiri atas dasar hukum yang diambil dari al-qaur'an dan dasar hukum as-sunnah.

Dalam Al-Qur'an Surat an-nisa ayat 4 menyatakan bahwa:

Artinya:

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".⁸

Penjelasan dari tafsir ayat di atas adalah Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

Makna menegaskan, mahar tidak hanya diberikan laki-laki kepada perempuan, tetapi dia pemilik tunggal atas mahar tersebut. Ayat diatas yang telah dikemukakan merupakan dalil sebagai dasar hukum yang kuat bahwa laki-laki wajib membayar mahar kepada perempuan yang hendak dinikahinya dengan ikhlas agar

_

⁸ Op.cit., An-Nisa', h.81

hak perempuan sejak awal telah ditegakkan. Disamping pembagian mahar tersebut di atas akhir-akhir ini berkembang mahar fiktif, yaitu: Mahar Fiktif adalah sesuatu yang bersifat fiksi dan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, maksudnya adalah kenyataan yang tidak benar dan ditutup-tutupkan dari yang sebenarnya.

Maksud penulis menerangkan tentang mahar disini adalah tentang mahar fiktif (mahar yang tidak sesuai dengan kenyataan). Yang maksudnya adalah pihak mempelai laki-laki yang memberikan mahar kepada calon istri nya tetapi dianggap tidak pantas atau tidak cukup oleh keluarga pihak calon istri, jadi karena hal itu maka calon istri tersebut menambahkan jumlah mahar yang akan disebutkan ketika pelaksanaan ijab dan qabul. Jadi ketika dalam penyebutan mahar pada saat ijab dan qabul tersebut sepengetahuan masyarakat luas mahar tersebut utuh pemberian suami, dan msyarakat tidak mengetahui bahwa dalam pemberian mahar tersebut telah ditambahkan oleh pengantin perempuan itu sendiri.

Dapat di artikan juga maksud dari Mahar Fiktif ini sendri Yang masalahnya adalah pihak mempelai laki-laki yang memberikan mahar kepada pihak mempelai perempuan atau calon istrinya hanya sebatas emas 10 Gram, tetapi oleh pihak mempelai perempuan tidak menyetujui dikarenakan terlalu sedikit, agar pernikahan tetap berjalan maka pihak mempelai perempuan menambahkan mahar tersebut sebanyak 5 Gram emas, sehingga genap menjadi 15 Gram emas, dan sepengetahuan masyarakat setempat mahar tersebut adalah 15 Gram emas, dan kasus ini terjadi di Desa Kesambe Lama Curup timur, sehingga yang menjadi kasus dalam

permasalahan mahar fiktif ini adalah penambahan jumlah mahar yang dimana telah ditutupi dari masyarakat sekitar, yang pada awalnya jumlah mahar hanya 10 Gram emas menjadi 15 Gram emas.

Karena mahar adalah sesuatu yang pokok dalam perkawinan maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi ke dalam sebuah penelitian ilmiah dalam bentuk skrisi.

B. Batasan Masalah

Agar dalam penelitian yang dilaksanakan terfokus, maka perlu adanya pembatasan masalah. Disini penulis akan membahas tentang *Mahar Fiktif Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif*.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1. Apakah penyebab terjadinya mahar fiktif?
- 2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap mahar fiktif?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian memiliki tujuan, dan tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya mahar fiktif.

2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap mahar fiktif.

E. Manfaat Penelitian

Dengan memperhatikan tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna secara teoritis, praktis dan untuk stain.

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan untuk masyarakat yang membaca hasil penelitian ini berdasarkan hukum islam yang baik dan benar.

2. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini, maka akan menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman peneliti tentang mahar yang fiktif baik dari teori dan praktik, serta dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

3. IAIN

Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup khususnya Jurusan Ahwal Al Syakhsyiyah (Hukum Keluarga). Dari hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat memperkaya pengetahuan, juga dapat dijadikan dasar pengembangan ilmu pengetahuan tentang mahar fiktif, oleh peneliti lain yang mempunyai minat pada kajian yang sama dan sekaligus sebagai penyelesaian tugas akhir pada mahasiswa.

D. Tinjauan Pustaka

Agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan penelitian lain maka dalam hal ini perlu di lakukan telaah kepustakaan. Sejauh informasi yang penulis ketahui ada yang membahas tentang perkara mahar adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang di tulis oleh Abdul Halim, ⁹ Konsep Mahar Dalam Pandangan Prof. Dr. Khoiruddin Nasution. Sebuah skripsi dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ahwal Al-Syaksyiyah tahun 2009. Skripsi ini berfokus pada pemikiran mahar yang kontras dan relefansi dengan konteks kekinian.

Kajian penelitian dalam skripsi ini memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan yang terjadi adalah sama-sama mengacu pada ruang lingkup mahar. Namun perbedaan yang terjadi adalah skripsi penulis mengungkap perbedaan yang mendasari pandangan mahar dari hukum islam dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Eva Fatimah¹⁰, *Perspektif Mahar dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Bugis* dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahwal Al-Syaksyiyah tahun 2008. Skripsi ini hanya membahas tentang mahar menurut empat Mdazhab.

¹⁰ Eva Fatimah, *Perspektif Mahar dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Bugis*, Skripsi Fak. UIN SYARIF HIDAYATULLAH ,Jakarta, 2008

-

⁹ Abdul Halim, *Konsep Mahar Dalam Pandangan Prof. Dr. Khoiruddin Nasution*, Skripsi Fak. UIN SUNAN KALIJAGA, Yogyakarta, 2009

Perbedaan skripsi ini dengan penulis bahwa skripsi ini lebih menekankan pada kajian mahar menurut empat madzhab. Sedangkan pembahasan penulis mengenai pandangan mahar dari hukum islam dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Ketiga, skripsi yang di tulis oleh Dwi Handayani, ¹¹ *Mahar Perspektif Madzab Hanafi dan madzab As-Syafi'I*, dari STAIN Ponorogo tahun 2011. Dalam skripsi ini diperoleh kesimpulan bahwa mahar Madzab Hanafi dan madzab As-Syafi'I adalah suatu pemberian calon suami kepada calon istri dengan penuh kerelaan tanpa mengharap imbalan, karena mahar bukanlah sebagai harga atau ganti rugi dari suatu yang dimiliki laki-laki pada perempuan. Madzab Hanafi menganggap bahwa mahar itu paling sedikit 10 Dirham atau 1 dinar (1 dinar= 5 gram emas, jika di kurs emas RP.100.000/gram berarti 1 dinar RP.500.000). selain itu bentuk mahar menurut Madzab Hanafi harus sesuatu yang bermanfaat, mempunyai nilai berharga terhadap calon istri.

Adapun penelitian ini agar tidak tumpang tindih dengan penelitian yang dilakukan peneliti lain, maka penelitian ini menitik beratkan tentang mahar fiktif dalam pandangan hukum islam dan hukum positif.

F. Metode Penelitian

Adapun yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif kualitatif.

Dalam langkah awal yang ditempuh adalah dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, barulah kemudian diklasifikasikan, deskripsi, dan analisis. Dalam

¹¹ Dwi Handayani *Mahar Perspektif Madzab Hanafi dan madzab As-Syafi'I*, Skripsi STAIN Ponorogo , 2011.

penelitian ini menggunakan jenis penelitian sumber data, tehnik pengumpulan data, dan tehnik analisis data yaitu:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis pergunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian kepustakaan. Riset kepustakaan yang dimaksud adalah melakukan penelitian terhadap bahan-bahan pustaka yang terdiri dari bahan primer dan sekunder yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian.

2. Sumber Data

Penulisan mengklasifikasikan bentuk data menjadi dua jenis, yaitu data sekunder. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

- a. Data Primer, sember data secara langsung dari objek yang diteliti atau dari orangnya langsung.
- b. Data Sekunder, diperoleh dengan mengutip melalui pendalaman terhadap literatur-literatur yang berkenaan dengan buku-buku penunjang atau data tambahan seperti majalah jurnal, dan artikel lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

3. Objek Penelitian

Dalam Penelitian ini, yang menjadi sumber data yang sehubungannya dengan permasalahan yang diteliti adalah:

a. Teknik Pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang di butuhkan maka penulis menggunakan tehnik adalah dengan mengutip buku-buku yang relevan dengan pembahasan dengan mencari literatur yang berkaitan dengan pokok pembehasan, kemudian mempelajari bagian-bagian yang dijadikan data.

b. Metode Analisis Data

Analisa data adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Analisis terhadap data yang bersifat deskriptif, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui gambaran jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Metode analisis data yang penyusun gunakan adalah

- a. Metode deduktif adalah cara berfikir analitik yang berangkat dari dasar pengetahuan yang bersifat umum diterapkan pada kenyataan yang bersifat khusus.
- b. Metode komperasi adalah usaha untuk membandingkan persamaan dan perbedaan sesuatu yang hakikat objek dapat dipahami dengan benar.

G. Sistematika Penulisan

Dalam menghasilkan tulisan yang baik, maka pembahasannya harus diuraikan secara sistematis. Sistematika penulisan laporan ini terdiri dari empat bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda namun dalam satu kesatuan yang mendukung dan melengkapi, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Batasan masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Metode Penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teori

Bab ini membahas tentang pernikahan dalam islam, yang meliputi: Pengertian pernikahan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan. Mahar dan permasalahannya yang meliputi, pengertian mahar, dasar hukum mahar, bentuk mahar, syarat dan tujuan mahar, macam-macam mahar, sifat mahar, berlakunya kewajiban mahar dan hikmah diwajibkannya mahar.

BAB III: Hukum islam dan Hukum Positif

Bab ini menjelaskan tentang bagai mana pandangan mahar fiktif menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

BAB IV : Hasil Penelitian

Bab ini membahas tentang Apakah penyebab terjadinya mahar fiktkif dan Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap mahar fiktif.

BAB V : Penutup

Yang berisikan kesimpulan dan saran serta daftar pustaka.

BAB II

LADASAN TEORI

A. Mahar Menurut Islam

1. Pengertian Mahar

Salah satu dari usaha Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusannya. Di zaman Jahiliyah hak perempuan itu dihilangkan dan disia-siakan, sehingga walinya dengan semena-mena dapat menggunakan hartanya, dan tidak memberikan kesempatan untuk mengurus hartanya, dan menggunakannya. Lalu Islam datang menghilangkan belenggu ini, kepadanya diberi mahar. Kata "Mahar" berasal dari bahasa Arab dan telah menjadi bahasa Indonesia terpakai. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan mahar itu dengan "pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah". Hal ini sesuai dengan tradisi yang berlaku di Indonesia bahwa mahar itu diserahkan ketika berlangsungnya akad nikah. Mahar atau mas kawin adalah harta pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang merupakan hak si istri.

¹ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah VII, (Bandung: PT Alma'arif,1981), 53.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 84.

³ Nasiri, *Hebohnya Kawin Misyar*, (Surabaya: Al Nur, 2010), 13.

Mahar merupakan satu di antara hak istri yang didasarkan atas *Kitabullah*, *Sunnah Rasul* dan *ijma*' kaum muslimin. ⁴ Madzhab Hanafi mendefinisikan sebagai sesuatu yang didapatkan seseorang perempuan akibat akad pernikahan atau persetubuhan. Mazhab Maliki mendefinisikannya sebagai sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai imbalan persetubuhan dengannya. Mazhab Syafi'i mendefinisikannya sebagai sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan, atau lewatnya kehormatan perempuan dengan tanpa daya, seperti akibat susuan dan mundurnya para saksi.

Mazhab Hambali mendefinisikan sebagai pengganti dalam akad pernikahan, baik mahar ditentukan di dalam akad, atau ditetapkan setelahnya dengan keridhaan kedua belah pihak atau hakim. Dalam tradisi Arab sebagaimana yang terdapat dalam kitab fiqh, mahar itu meskipun wajib, namun tidak mesti diserahkan waktu berlangsungnya akad nikah dalam arti boleh diberikan waktu akad nikah dan boleh pula sesudah berlangsungnya akad nikah itu. Definisi yang diberikan oleh ulama waktu itusejalan dengan tradisi yang berlaku waktu itu. Oleh karena itu, definisi tepat yang dapat mencakup keduanya kemungkinan itu adalah: "pemberian khusus yang bersifat wajib berupa uang atau barang yang diserahkan memepelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika atau akibat dari berlangsungnya akad nikah".

⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Madzhab, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), 364.

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, (Damaskus: Darul Fikir, 2007), 230.

mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan tidak dalamkesempatan akad nikah atau setelah selesai peristiwa akad nikah tidak disebut mahar, tetapi *nafaqah*.

Bila pemberian itu dilakukan secara sukarela diluar akad nikah tidak disebut mahar atau dengan arti pemberian biasa, baik sebelum akad nikah atau setelah selesainya pelaksanaan akad nikah. Demikian pula pemberian yang diberikan mempelai laki-laki dalam waktu akad nikah, namun tidak kepada mempelai perempuan, tidak disebut mahar. Secara istilah, mahar diartikan sebagai "harta yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya akad". Golongan Hanabilah mendefinisikan mahar sebagai "suatu imbalan dalam nikah baik yang disebutkan didalam akad atau yang diwajibkan sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak atau hakim, atau imbalan dalam hal-hal yang menyerupai nikai seperti wat}'i syubhat dan wat}'i yang dipaksakan". Secara istilah, mahar diartikan sebagai "suatu imbalan dalam nikah baik yang disebutkan didalam akad atau yang diwajibkan sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak atau hakim, atau imbalan dalam hal-hal yang menyerupai nikai seperti wat}'i syubhat dan wat}'i yang dipaksakan".

Mahar sudah dikenal pada masa jahiliyah, jauh sebelum Islam datang. Akan tetapi, mahar sebelum datangnya Islam bukan diperuntukkan kepada calon istri, melainkan kepada ayah atau kerabat dekat laki-laki dari pihak istri, karena konsep perkawinan menurut berbagai bentuk hukum adat ketika itu sama dengan transaksi jual beli, yakni jual beli antara calon suami sebagai pembeli dan ayah atau keluarga dekat laki-laki dari calon istri sebagai pemilik barang. Ketika Alquran datang, mahar tetap dilanjutkan, hanya saja konsepnya yang mengalami perubahan. Kalau dahulu mahar dibayarkan kepada orang tua (ayah) calon istri sekarang mahar

⁶ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009), 85.

⁷ Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 64.

tersebut diperuntukkan calon istri. Dengan demikian Alquran mengubah status perempuan sebagai "komoditi" barang dagangan menjadi subjek yang ikut terlibat dalam suatu kontrak.⁸ Konsep tentang maskawin atau mahar adalah bagian yang esensial dalam pernikahan. Tanpa maskawin atau mahar tidak dinyatakan telah melaksanakan pernikahan dengan benar. Maskawin atau mahar harus ditetapkan sebelum pelaksanaan pernikahan.⁹

2. Dasar Hukum Mahar

Hukum Islam mendudukkan perempuan sebagai makhluk terhormat dan mulia, maka diberikan hak untuk menerima mahar, bukan pihak yang sama-sama memberi mahar. Mahar merupakan salah satu bentuk hadiah yang diberikan seorang pria sebagai ungkapan kesetiaan cintanya kepada calon istrinya. Ekualitas laki-laki dan perempuan bukan diimplementasikan dengan cara pemberian mahar. Karena mahar bukan lambang jual-beli, tetapi lambang penghormatan terhadap perempuan sekaligus sebagai lambang kewajiban tanggung jawab suami memberi nafkah kepada istri, selain lambang cinta kasih sayang suami terhadap istri, sebagaimana dikemukakan ulama Syafi'iyah. ¹⁰ Seperti yang dijelaskan pada QS An-nisa' ayat 4:

⁸ Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan Dalam Islam,* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 25.

⁹ Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan*, (Jakarta: Teraju, 2004), 101.

¹⁰ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 124.

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَتِ إِنَّ خِلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيَّا مَّرِيَّا ﴿

Artinya: "Berikanlah kepada para wanita (yang kalian nikahi) mahar (mas kawin)-nya sebagai pemberian yang disertai dengan kerelaan. Kemudian, jika mereka memberikan sebagiannya kepada kalian dengan senang hati, kalian boleh memakannya (sebagai makanan) yang sedap dan bermanfaat". (QS an-Nisâ': 4)¹¹

Ayat diatas berpesan kepada semua orang, khususnya para suami dan wali yang sering mengambil mahar perempuan yang berada dalam perwaliannya. Maskawin dinamai oleh ayat ini *shadaq.*, bentuk jamak dari *ashdaq*, yang terambil dari akar yang berarti "kebenaran". Ini karena maskawin itu didahului oleh janji, maka pemberian itu merupakan bukti kebenaran dan janji. Dapat juga dikatakan bahwa maskawin bukan saja lambang yang membuktikan kebenaran dan ketulusan hati suami untuk menikah dan menanggung kebutuhan hidup istrinya, tetapi lebih dari itu, ia adalah lambang dari janji untuk tidak membuka rahasia kehidupan rumah tangga, khususnya rahasia terdalam yang tidak dibuka oleh seorang wanita kecuali suaminya. Menamai maskawin dengan nama tersebut di atas diperkuat oleh lanjutan ayat yakni *nihlat*. Kata ini berarti "pemberian yang tulus tanpa mengharapkan sedikitpun imbalan". Ia juga dapat berarti agama, pandangan hidup, sehingga maskawin yang diserahkan itu merupakan bukti kebenaran dan ketulusan hati sang suami yang diberikannya

.

¹¹ Departemen Agama R.I, *Al-qur'an dan terjemah*, (Bandung: Jumanatul'ali-Art, 2004)

tanpa mengaharapkan imbalan, bahkan diberikannyakarena didorong oleh tuntutan agama atau pandangan hidupnya.

Kerelaan istri menyerahkan kembali maskawin itu harus benar-benar muncul dari lubuk hatinya. Dari ayat ini dipahami adanya kewajiban suami membayar maskawin buat istri dan bahwa maskawin itu adalah hak istri secara penuh. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas. Dari dasar hukum mahar tersebut jelaslah bahwa hukum memberi mahar itu adalah wajib. Artinya arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya itu dan berdosa suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya.

Dari adanya perintah Allah dan perintah Nabi untuk memberikan mahar itu, maka ulama sepakat menetapkan hukum wajibnya memberi mahar kepada istri. Tidak ditemukan dalam literature ulama yang menempatkan sebagai rukun. Mereka sepakat menempatkannya sebagai syarat sah bagi suatu perkawinan. Artinya perkawinan yang tidak pakai mahar adalah tidak sah. Bahkan ulama *Zahiriyyah* mengatakan bahwa bila dalam akad nikah dipersyaratkan tidak pakai mahar, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Kompilasi Hukum Islam

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol.2 (Jakarta: Lentara Hati, tt),329-330.

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 87.

mengatur mahar secara panjang lebar dalam beberapa Pasal-pasal, diantaranya dalam pasal 30, 31 dan 32, yang hampir keseluruhannya mengadopsi dari kitab fiqh menurut jumhur ulama.

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. 14

Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.¹⁵

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya. ¹⁶

Pengaturan mahar bertujuan untuk:¹⁷

- a. Untuk menertibkan masalah mahar,
- b. Menetapkan kepastian hukum bahwa mahar bukan "rukun nikah",
- c. Menetapkan etika mahar atas asas "kesederhanaan dan kemudahan", bukan didasarkan atas asas prinsip ekonomi, status, dan gengsi,
- d. Menyeragamkan konsepsi yuridis dan etika mahar agar terbina ketentuan dan persepsi yang sama di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum.

¹⁴ KHI, Pasal 30 Tahun 1974

¹⁵ KHI, Pasal 31 Tahun 1974

¹⁶ KHI, Pasal 32 Tahun 1974

 $^{^{17}}$ Yahya harahap, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),40.

3. Bentuk Mahar

Mahar adalah sebagai bukti kebenaran cinta calon suami terhadap calon istrinya. Pendapat itu adalah benar, karena setiap orang pasti berkehendak memberikan dan mewujudkan cinta kasihnya berupa benda kepada orang yang dicintainya, membahagiakan belahan jiwanya, lebih lagi kepada orang yang diniatkan untuk dijadikan pasangan hidup di dunia dan akhirat dan akan melahirkan anak-anaknya yang sekaligus merupakan amanah Allah SWT. Mahar atau hantaran dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk terlaksananya suatu perkawinan dapat berupa benda-benda berharga yang bersifat sakti atau magis seperti keris pusaka, kain-kain tenunan. Karena dengan suatu perkawinan, tercabutlah salah satu unsur penting yang ada dalam lingkungan dalam keluarga semula yaitu wanita yang hendak dikawinkan itu.

Tercabut baik dalam arti pindah kepada keluarga lain yang telah ada yaitu keluarga suaminya dalam masyarakat yang menjadikan pindahnya seorang wanita ke marga atau keluarga suaminya yang telah dia kawin dan pindah keluarga itu dapat pula diartikan dalam arti yang lebih umum, yaitu pindah dan keluar dari keluarganya semula karena membentuk keluarga baru beserta suaminya. Pada masa terakhir ini di Indonesia biasanya mahar ini telah dilaksanakan dengan memberikan sebuah Alquran atau terjemahan Alquran atau

¹⁸ *Ibid*, 132.

seperlengkapan mukenah untuk sholat. Disamping itu adakalanya dibarengi juga dengan sekedar perhiasan sebentuk cincin untuk si istri.

Menurut ketentuan Departemen Agama, mahar dibuat sedemikian ringannya sehingga tidak menghalangi perkawinan, misalnya sebanyak Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah). Ini tidak perlu menghinakan perempuan yang akan dikawini itu malahan untuk kebaikan secara umum anngota masyarakat Islam Indonesia. Pada umumnya mahar itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syari'at Islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama. Mahar dalam bentuk jasa ini ada landasannya dalam Alquran dan demikian pula dalam hadis nabi. Dalam Alquran contoh mahar bentuk jasa ialah mengembalakan kambing selama 8 tahun sebagai mahar perkawinan seorang perempuan. Hal ini dikisahkan Allah dalam surat al-Qashas} ayat: 27

Artinya: "berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik". ¹⁹

_

¹⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponogoro, 2009)

4. Syarat, dan Tujuan Mahar Dalam Hukum Islam

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat sebagai berikut;

- a. Harta atau bendanya adalah sesuatu yang berharga. Maksudnya, mahar adalah sesuatuyang dapat dinilai dan dihargai walaupun itu sekecilnya.
- b. Mahar terseput benda yang suci dan dapat dimanfatkan.
- c. Mahar tersebut bukan mahar yang ghasab (barang yang diperoleh dari hasil mencuri.
- d. Mahar harus barang yang jelas keadaannya, maka tidak sah memberikan mahar berupa sesuatu yang belum tentu jelas.²⁰

Tujuan dari Mahar Dalam Islam sendiri adalah:

- a. Perlu di ketahui bahwa mahar hanyalah sebuah media, bukan sebuah tujuan utama. Tujuan menikah dalam Islam bukanlah sarana untuk mencari mahar yang mahal ataupun mahar yang besar.
- b. Mas kawin atau mahar juga bukan untuk di jadikan bahan pameran kepada khalayak. Mahar bertujuan untuk memuliakan mempelai wanita. Jadi jika kamu mau menikah, sebaiknya tidak

²⁰ Busriyanti, Fiqh Pernikahan, (Curup: LP2 STAIN, 2011), h.33

dipusingkan dengan urusan mahar, meynusahkan diri dengan urusan mahar, karena tujuan utama menikah dalam Islam bukanlah mahar.

5. Macam-Macam Mahar

Mahar dapat dilihat dari dua sisi, kualifikasi dan klasifikasi mahar. ²¹ Dari sisi kualifikasi mahar dapat di bagi dua, mahar yang berasal dari benda-benda konkrit seperti mahar dinar, dirham atau emas dan mahar dalam bentuk manfaat jasa seperti mengajarkan Alquran, bernyanyi dan sebagainya. Mahar itu adalah suatu yang wajib diadakan meskipun tidak dijelaskan bentuk dan harganya pada waktu akad. Dari segi dijelaskan atau tidaknya mahar itu pada waktu akad, mahar itu ada dua macam: *Pertama*: mahar musamma yaitu mahar yang disebutkan bentuk, wujudnya atau nilainya dan besarnya disepakati kedua belah pihak dan dibayarkan secara tunai atau ditangguhkan atas persetujuan istri dalam akad. ²²

Inilah mahar yang umum berlaku dalam suatu perkawinan. Selanjutnya kewajiban suami untuk memenuhi selama hidupnya atau selama berlangsungnya

²¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 74.

²²Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 66.

perkawinan. Suami wajib membayar mahar tersebut yang wujud atau nilainya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam akad perkawinan iitu.²³

Mahar *musamma* sebaiknya diserahkan langsung secara tunai pada waktu akad nikah supaya selesai pelaksanaan kewajiban. Meskipun demikian, dalam keadaan tertentu dapat saja tidak diserahkan secara tunai, bahkan dapat pembayarannya secara cicilan. Sebagian ulama diantaranya malikiyah menghendaki pemberian pendahuluan mahar bila setelah akad berlangsung si suami menghendaki bergaul dengan istrinya. Kedua: bila mahar yang tidak disebutkan jenis dan jumlahnya pada waktu akad, maka kewajibannya adalah membayar mahar sebesar mahar yang diterima oleh perempuan lain dalam keluarga istri seperti adhik atau kakaknya yang terlebih dahulu menikah. Mahar dalam bentuk ini disebut mahar mitsil. Ulama Hanafiyah secara spesifik memberi batasan mahar mistsil itu dengan mahar yang pernah diterima oleh saudaranya, bibinya dan anak saudara pamannya yang sama dan sepadan kekayaannya, tingkat kecerdasannya, umurnya, kecantikannya, keberagamannya, negeri tempat tinggalnya, dan masanya dengan istri yang akan menerima maharnya tersebut. Mahar mitsil diwajibkan dalam kemungkinan:²⁴

a. Dalam keadaan suami tidak ada menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya.

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009), 89.
 Ibid.

- b. Suami menyebutkan mahar *musamma*, namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti maharnya adalah minuman keras.
- c. Suami ada menyebutkan mahar *musamma*, namun kemudian suami istri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat diselesaikan. Bila mahar tidak dalam bentuk tunai kemudian terjadi putus perkawinan setelah melakukan hubungan kelamin, sewaktu akad maharnya adalah dalam bentuk *musamma*, maka kewajibannya suami yang menceraikan adalah mahar secara penuh sesuai dengan bentuk dan jumlah yang ditetapkan dalam akad.²⁵

Demikian pula keadaannya bila salah seorang di antara keduanya meninggal dunia karena meninggal dunia itu telah berkedudukan sebagai telah melakukan hubungan kelamin. Namun bila perceraian terjadi sebelum berlangsung hubungan kelamin, sedangkan jumlah mahar sudah ditentukan, maka kewajiban mantan suami hanyalah separuh dari jumlah yang ditetapkan waktu akad, kecuali bila yang separuh itu telah dimaafkan oleh mantan istri atau walinya. Hal ini dijelaskan Allah dalam surat al-Baqarah ayat 237:

وَإِن طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبَلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَد فَرَضَتُم لَهُنَّ فَرِيضَةً فَرِيضَةً فَزِيضَةً فَزِصْفُ مَا فَرَضَتُم إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِه عُقْدَةُ

_

²⁵ Ibid. 90.

ٱلنِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوۤا أَقُرَبُ لِلتَّقُوك ۚ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضَلَ بَيْنَكُم ۚ إِنَّ ٱلنِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْمُلُونَ بَصِيرُ ﴿ اللَّهَ بَمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ اللَّهَ بَمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ اللَّهَ عَمَلُونَ عَمِيرُ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَلُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

Artinya: Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, sedangkan kamu telah menentukan maharnya, maka bayarlah separuh dari mahar yang telah ditentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah.

6. Sifat-Sifat Mahar

Mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabotan rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan, atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga. ²⁶
Adapun syarat-syarat yang boleh dijadikan mahar sebagai berikut:

- a. Jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya.
- b. Barang itu miliknya sendiri secara pemilikan penuh dalam arti dimiliki zatnya dan dimiliki pula manfaatnya. Bila salah satunya saja yang dimiliki, seperti manfaatnya saja dan tidak zatnya umpamanya barang yang dipinjam, tidak sah dijadikan mahar.
- c. Barang itu sesuatu yang memenuhi syarat untuk diperjualbelikan dalam arti barang yang tidak boleh diperjualbelikan tidak boleh dijadikan mahar, seperti minuman keras, daging babi, dan bangkai.
- d. Dapat diserahkan pada waktu akad atau pada waktu yang dijanjikan dalam arti barang tersebut sudah berada ditangannya pada waktu diperlukan.²⁷

_

²⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Madzhab, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007),

Mengenai sifat-sifat mahar, fuqaha telah sependapat tentang sahnya pernikahan berdasarkan pertukaran dengan suatu barang tertentu yang kenal sifatnya, yakni tertentu jenis, besar, dan sifatnya. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang barang yang tidak diketahui sifatnya dan tidak ditentukan jenisnya. Seperti jika seseorang mengatakan, "Aku kawinkan engkau dengan dia (wanita) atas (mahar) seorang hamba atau pelayanannya," tanpa menerangkan sifat-sifat hamba atau pelayanan itu yang dengannya dapat ditentukan harganya. Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan dengan cara seperti itu diperbolehkan. Apabila terjadi perkawinan seperti itu, maka Imam Malik berpendapat bahwa pengantin wanita memperoleh jenis dari apa yang disebutkan untuknya. Sedang Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pengantin pria dipaksa untuk mengeluarkan harganya (yakni harga hamba atau pelayanan itu), sedangkan menurut Imam Syafi'i tidak membolehkan.

7. Berlakunya Kewajiban Mahar

Tentang semenjak kapan berlakunya kewajiban mahar itu ulama sepakat mengatakan bahwa dengan berlangsungnya akad nikah yang sah berlakulah kewajiban untuk membayar separuh mahar yang ditentukan waktu akad. Alasannya ialah walaupun putus perkawinan atau kematian seseorang di antara

²⁷ Mardani, *Op Cit.*, hal.80

²⁸ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, *Jilid II*, (Semarang: As-Syifa', 1990), 393.

suami istri terjadi *dukhul*, namun suami telah wajib memebayar separuh mahar yang disebutkan waktu akad.²⁹ Tentang kapan mahar wajib dibayar keseluruhannya Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah sepakat tentang dua syarat, yaitu: hubungan kelamin dan matinya salah seorang di antara keduanya setelah berlangsunya akad. Kesepakatan mereka didasarkan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 237:

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضَٰتُمۡ هَٰنَ فَرِيضَةً فَرَضَٰتُمۡ هَٰنَ فَرِيضَةً فَنِصۡفُ مَا فَرَضَٰتُمۡ إِلَّاۤ أَن يَعۡفُونَ أَوۡ يَعۡفُواْ ٱلَّذِى بِيَدِهِ عُقَدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعۡفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقُوك ۚ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضَلَ بَيۡنَكُمۡ ۚ إِنَّ ٱلنِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعۡفُواْ أَقُرَبُ لِلتَّقُوك ۚ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضَلَ بَيۡنَكُمۡ ۚ إِنَّ ٱلنِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعۡفُواْ أَقُرَبُ لِلتَّقُوك ۚ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضَلَ بَيۡنَكُمۡ ۚ إِنَّ ٱللّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرُ ﴿

Artinya: Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum sempat kamu sentuh dan kamu telah menetapkan untuk mereka mahar, maka kewajibanmu separuhnya.

Di luar dua hal tersebut terdapat perbedaan pendapat. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa kewajban mahar itu dimulai dari *khalwah*, meskipun belum berlaku hubungan kelamin. *Khalwah* itu oleh ulama Hanafiyah statusnya sudah disamakan dengan bergaulnya suami istri dalam banyak hal.

-

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 87.

Sedangkan Ibnu Abi Laila mewajibkan mahar semenjak berkumpulnya suami istri tanpa persyaratan apa-apa. 30

8. Hikmah Diwajibkannya Mahar

Mahar itu merupakan pemberian pertama seorang suami kepada istrinya yang dilakukan pada waktu akad nikah. Dikatakan yang pertama karena sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban materiil yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan untuk kelangsungan hidup perkawinan itu. Dengan pemberian mahar itu suami dipersiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban materiil berikutnya. Diberlakunya mahar di dalam Islam memiliki hikmah yang cukup dalam antara lain:³¹

- a. Untuk menghalalkan hubungan antara pria dan wanita, karena keduanya saling membutuhkan.
- b. Untuk memberi penghargaan terhadap wanita, dalam arti bukan sebagai alat tukar yang mengesankan pembelian.
- c. Untuk menjadi pegangan bagi istri bahwa perkawinan mereka telah diikat dengan perkawinan yang kuat, sehingga suami tidak mudah menceraikan istrinya sesukanya
- d. Untuk kenangan dan pengikat kasih sayang antara suami istri. 32

³⁰ Ibid, 88

³¹ Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 66.

³² Nurjannah, *Mahar Pernikahan*, (Yogyakarta: Prima Shopi, 2003), 55-56.

e. Menunujukkan pentingnya dan posisi akad, serta menghargai dan memuliakan perempuan.³³

Mahar sebagai kewajiban laki-laki bukan perempuan, selaras dengan prinsip syariat bahwa seorang perempuan sama sekali tidak dibebankan kewajiban nafkah, baik sebagai ibu, anak perempuan, ataupun seorang istri. Sesungguhnya yang dibebankan untuk memberi nafkah adalah orang laki-laki, baik yang berupa mahar maupun nafkah kehidupan, dan yang selainnya karena orang laki-laki lebih mampu untuk berusaha dan mencari rizeki.

B. Hibah

1. Pengertian Hibah

Hibah adalah pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau badan social, keagamaan atau untuk kepentingan ilmiah. Juga kepada seseorang yang sekiranya berhak menjadi ahli waris si penghibah dapat menghibahkannya. Hibah seperti hal nya wasiat, tidak boleh berlebih-lebihan, sehingga dapat membahayakan atau merugikan orang yang berhibah dan keluarganya sendiri. Islam melarang seseorang member hibah kepada dengan keluarganya secara tidak adil atau pilih kasih. Sebab pemberian

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, (Damaskus: Darul Fikir, 2007), 232.

yang tidak adil dapat menimbulkan efek psikologis yang negatif dikalangan keluarganya.³⁴

2. Rukun Hibah

Suatu hibah terjadi apabila memenuhi rukun sebagai berikut :

- a. Adanya pemberi hibah (*al-wahib*), yaitu pemilik sah barang yang dihibahkan. Ketika penyerahan barang, pemberi hibah dalam keadaan sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, serta tidak karena terpaksa. Dan apabila hibah diberikan dan si pemberi hibah dalam keadaan sakit dan dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.
- b. Adanya penerima hibah (*Al-Mauhublahu*), yaitu setiap orang, baik perorangan atau badan hukum. Tidak sah suatu hibah, jika penerima hibah adalah anak yang masih dalam kandungan.
- c. Terjadi ijab qabul, yaitu serah terima antara pemberi dan penerima.
- d. Adanya barang yang dihibahkan, yang terdiri dari segala macam barang, baik yang bergerak atau tidak bergerak; bahkan manfaat atau hasil suatu barang.

³⁴ Masjfuk Zuhdi, Fiqh Muamalah, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada: 1993), hal. 75-76

3. Syarat Hibah

Adapun yang menjadi syarat dalam hibah yaitu:

- a. Sesuatu yang dihibahkan ialah boleh diperjual belikan
- b. Yang menghibahkan sudah baligh, berakal, tidak terlarang mempergunakan hartanya dan yang dihibbahkan miliknya sendiri
- c. Orang yang menerima hibbah dengan syarat berhak memiliki sesuatu yang dihibahkan. Tidak sah hibbah kepada bayi yang dalam kandungan, karena ia tidak dapat meiliki.
- d. syarat ucapan (shighat) ijab qabul dalam hal jual beli. 35

4. Dasar Hukum Hibah

Hibah disyariatkan dan dihukumi mandub (sunat) dalam Islam. Dan Ayat ayat Al quran maupun teks dalam hadist juga banyak yang menganjurkan penganutnya untuk berbuat baik dengan cara tolong menolong dan salah satu bentuk tolong menolong tersebut adalah memberikan harta kepada orang lain yang betul – betul membutuhkannya.

Para ulama fiqh sepakat bahwa hukum hibah itu sunah. Hal ini di dasari oleh nash Al-Quran dan hadits Nabi.

a. Dalil Al-Quran

³⁵ Ali Hasan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal.78

Artinya: "Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa".(QS. An-Nissa ayat 4)

b. Dalil Al-Hadits

Adapun barang yang sudah dihibahkan tidak boleh diminta kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya dalam sabda Nabi :

لا يحلّ لرجل أن يعطى عطيّة أوييهب هبة فيرجع فيها الا الوالد فيما (يعطى لولده. (رواه ابو داوود وغيره

Artinya: "Tidak halal bagi seseorang yang telah memberi sesuatu pemberian atau menghibahkan suatu hibah atau menarik kembali kecuali orang tuua yang memberi kepada anaknya." (HR. Abu Daud)³⁶

³⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal.159-160

BAB III

HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Kata hukum dalam bahasa Indonesia yang kita pakai berasal dari bahasa Arab, yaitu *hukm*. Artinya norma atau kaidah, yaitu ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman yang di gunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda.¹

Di dalam Islam ada lima hukm atau kaidah, yang dijadikan patokan perbuatan manusia, baik beribadah maupun bermuamalah. Lima kaidah itu adalah wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Wajib adalah suatu kaidah hukum Islam yangmengandung perintah harus dilaksanakan dengan mendapat pahala dan berakibat mendapat dosa bila meninggalkannya. Sunnah mengandung suatu anjuran untuk melaksanakan sesuatu yang akan memberi manfaat memperoleh pahala bagi pelaku dan tidak ada konsekuensi menanggung dosa bila meninggalkannya. Makruh merupakan kaidah yang mengandung muatan yang selayaknya tidak dilakukan dengan mendapatkan pahala dan bila dilakukan akan mendatangkan kerugian bagi pelaku tidak berdosa. Mubah adalah kaidah yang memberikan kewenangan kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak

¹ Mohammad Daud Ali, *hukum islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), hal.235.

melakukan sesuatu. Sementara haram merupakan kaidah yang mengandung larangan untuk dilakukan dengan konsekuensi mendapat dosa, namun bila ditinggalkan akan mendapat pahala.²

2. Ruang Lingkup Hukum Islam

Jika kita bandingkan hukum islam bidang muamalah ini dengan hukum barat yang membedakan antara hukum privat (hukum perdata) dengan hukum publik,maka sama halnya dengan hukum adat di tanah air kita, hukum Islam tidak membedakan dengan tajam antara hukum perdata dengan hukum publik disebabkan karena menurut system hukum Islam pada hukum perdata terdapat segi-segi publik ada segi-segi perdatanya.

Itulah sebabnya maka dalam hukum Islam tidak dibedakan kedua bidang hukum itu. Yang disebutkan adalah bagian-bagian nya saja seperti, munakahat, muamalat dalam arti khusus, jinayat, al – ahkam as sulthaniyah (khilifah), siyar, dan mukhasamat.³

Sementara dalam pembahasan ushul fiqh, hukum hujum islam dilihat dari segi dalilnya dapat diklasifikasikan menjadi empat, yaitu:

- a. Hukum islam yang dalilnya bersifat qath'I, baik ayat Al Quran maupun sunnah
- b. Hukum islam yang dalilnya bersifat *zann*, baik ayat Al-Quran maupun sunnah

² Muchsin, *Hukum Islam*, (Surabava: Al Ikhlas 2003), Hal. 23-24

³ Rasjidi.: *Hukum Islam Dan Pelaksanaanya Dalamsejarah*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), Hal

- c. Hukum islam yang dalilnya berupa ijma'
- d. Hukum islam yang belum di tunjukkan oleh Al-Quran, sunnah, atau ijma', yaitu hukum Islam yang dihasilkan dari dalil atau sumber lain selain Al-Quran, sunnah, dan ijma', seperti Qiyas, istislah, ihtihsan, dan lain-lain.⁴

3. Ciri- ciri Hukum Islam

Dari uraian tersebut di atas dapatlah ditandai ciri-ciri (utama) hukum islam, yakni:

- a. Merupakan bagian dan bersumber dari agama islam
- Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak islam
- c. Mempunyai dua istilah kunci yakni, syari'at terdiri dari wahyu allah dan sunnah Nabi Muhammad dan fikih adalah pemahaman dan hasil pemahaman manusia tentang syari'at.
- d. Terdiri dari dua bidang utama yaitu, ibadah bersifat karena telah sempurna dan muamalah dalam arti luas bersifat terbuka untuk di kembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat dari masa kemasa

⁴ Badri Khaeruman, *Hukum Islam*, (Bandung, Pustaka Setia: 2010), Hal.26

e. Strukturnya berlapis terdiri dari: Nas atau teks al-Qur'an dan Sunnah nabi muhamad (untuk syari'at)

Ciri-ciri khas hukum islam yang relevan untuk dicatat disini adalah hukum islam berwatak universal berlaku abadi untuk ummat islam dimanapun mereka berada tidak terbatas pada ummat islam di suatu tempat atau Negara pada suatu masa saja. Menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani dan jasmani serta memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara keseluruhan. Pelaksanaannya dalam praktik digerakkan oleh iman(akidah) dan akhlak ummat manusia.

4. Tujuan Hukum Islam

Hukum yang mejadi penutan masyarakat merupakan cita-cita sosial yang tidak pernah berhenti dikejar sampai akhir hayat. Cita-cita sosial bersandarkan pada hukum. Setiap keberadaan hukum tidak dapat terlepas dari tujuan dan harapan subjek hukum. Harapan manusia terhadap hukum pada umumnya meliputi harapan keamanan dan ketenteraman hidup tanpa batas waktu. Adapun tujuan hukum Islam adalah:

- a. Kemaslahatan hidup bagi diri orang lain
- b. Menegakkan keadilan
- c. Persamaan hak dan kewajipan dalam hukum
- d. Saling kontrol dalam masyarakat

- e. Kebebasan berekpresi,berpendapat,bertindak dengan tidak melebihi batasan hukum.
- f. Regenerasi sosial yang positif dan bertanggung jawab.⁵

5. Sumber Hukum Islam

Sumber adalah asal sesuatu. Sumber hukum Islam adalah asal atau tempat pengambilan hukum islam. Dalam kepustakaan hukum Islam di Indonesia, sumber hukum Islam kadang-kadang disebut dalil hukum Islam atau asas hukum islam atau dasar hukum Islam.

Sumber Hukum Islam ialah segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau yang menjadi sumber syari'at islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad (Sunnah Rasulullah SAW). 6

Adapun sumber hukum Islam adalah Al-Quran, Al hadis, dan Ar-ra'yu (penalaran). Perkataan Al-Quran berasal dari kata kerja qaraa yang artinya dia telah membaca. Kata kerja ini berubah menjadi kata benda qur'an, yang secara harfiah berarti bacaan atau sesuatu yang harus dibaca atau dipelajari. Makna perkataan itu sangat erat hubungannya dengan arti ayat Al-Quran yang pertama diturunkan di Gua Hira yang dimulai dengan perkataan iqra' artinya bacalah.

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, cet 2:2008) hal.15

⁵ Zainudin Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika: 2006) hal. 8-10

Al-quran sebagaui sumber hukum yang pertama dan utama sebagaimana yang diungkapkan oleh Allah dalaqm Al-quran Surah An-Nisaa' (4) ayat 105.⁷

Artinya: sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) orang-orang yang berkhianat.⁸

B. Hukum Positif

1. Pengertian Hukum Positif

Hukum Positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie). Hukum Agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi

_

⁷ Ibit , hal. 24-25

⁸ Departemen Agama R.I, *Al-qur'an dan terjemah*, (Bandung: Jumanatul'ali-Art, 2004), hal. 95

hukum atau Syari'at Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum Adat yang diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara.

2. Sejarah Hukum Positif

Mengenai sejarah hukum Indonesia sama dengan mempelajari masa-masa kejayaan Islam. Apabila kita membaca buku sejarah hukum, sebagai contoh 'civil law', maka dikaitkan dengan Negara Perancis, sedangkan 'common law', dikaitkan dengan Negara Inggris. Namun, Inggris dan Perancis, terutama Perancis mengadopsi ajaran dinasti Islam yang pernah berjaya di Eropa, yang mengetahui administrasi atau tata kelola negara. Pengetahuan mereka tentang hukum harus dikodifikasi dan undang-undang harus dibuat secara tertulis. Namun, apabila kita membaca sumber mengenai sejarah hukum positif, hanya menyebutkan hingga sejarah tata kelola Perancis.

Di dunia ini terdapat dua sistem hukum yang terkenal, yaitu *civil law* dan *common law. Civil law* (Eropa Kontinental) adalah sistem hukum yang dianut oleh Negara Eropa daratan (Belanda, Perancis) maupun negara jajahan Perancis. Cirinya adalah hakim bertugas hanya menerjemahkan apa yang telah tertulis dalam kodifikasi (sumber-sumber hukum yang disatukan atau dibukukan) secara

_

⁹ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal.147

tertentu. Sedangkan negara penganut *common law* adalah negara Eropa Kontinental, selain Negara Eropa Daratan (Inggris, Australia, Britania Raya kecuali Malaysia). Ciri dari *common law* adalah suatu sistem hukum dimana hakim menjadi sumber utama, dan kodifikasi yang ada hanyalah sebuah gambaran besar bahwa hakim dalam memutuskan perkara tidak terlepas dari kodifikasi.

Apabila kita berbicara mengenai tata hukum Indonesia, terdapat tiga periodisasi. Yang pertama adalah masa imperialisme (pra kolonialisme), masa penjajahan Belanda, dan masa kemerdekaan. Nusantara adalah wilayah dimana sebelum penjajah datang, ia bukanlah negara yang belum maju. Ada dua sistem hukum yang berlaku saat itu, yaitu sistem peradilan bagi raja-raja dan sistem peradilan bagi kepala daerah atau pejabat, dengan kata lain adalah hukum adat. Raja memiliki otoritas sehingga raja dapat disebut sebagai negara, dan negara adalah raja. Keputusan akhir dari sebuah hukum adalah dari raja. Apa yang diucapkan raja adalah undang-undang dan ketetapannya adalah ketetapan yang tidak bisa diganggu-gugat. Hal ini mirip dengan sistem common law, yaitu raja mengeluarkan suatu undang-undang tertentu yang kemudian diterjemahkan oleh masing-masing kepala daerah. Dan masing-masing kepala daerah tersebut menerjemahkan undang-undang dengan sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga terciptalah hukum adat yang berbeda-beda di setiap daerah. Namun setiap keputusan memiliki persamaan, yaitu karakteristik terhadap hukum yang berlaku dalam hal sanksi dan memutuskan hukuman dalam suatu perkara. Dalam hukum adat, tidak ada pemisahan yang jelas atau sistematis terkait hukum perorangan atau hukum perdata, seperti hukum perceraian secara khusus. ¹⁰

3. UU No 1 Tahun 1974

Diundangkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak lepas dari upaya Negara dalam hal ini pemerintah untuk memberikan kepastiah hukum bagi warga negara khususnya yang beragama Islam. Undang-undang ini dibuat untuk mengatur seputar masalah perkawinan dan akibat hukumnya bagi mereka yang beragama Islam. Berdasarkan uraian di atas, maka setiap perkawinan yang dilangsungkan oleh warga negara yang beragama Islam setidaknya harus mengacu dan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974. Materi Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pada dasarnya merupakan kumpulan tentang hukum munakahat yang terkandung dalam al-Qur'an, Sunnah Rasulullah, dan kitab-kitab fikih klasik maupun fikih kontenporer yangt telah berhasil diangkat oleh sistem hukum nasional dari hukum normatif menjadi hukum tertulis yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa kepada rakyat Indonesia, terutama umat muslim. 11

 $^{\rm 10}$ Budiono Kusumohamidjojo, Filsafat Hukum, (Jakarta: Grasindo, 2004) hal. 112-114

¹¹ Abdul Shomad, Hukum Islam, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 289

Di dalam hukum positif mahar diatur di dalam pasal 30 sampai pasal 38, di dalam pasal 30 dinyatakan:

Calon mempelai pria, wajib membayar mahar kepada calon mempelai perempuan yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Penyebab Terjadinya Mahar Fiktif

Terjadinya mahar fiktif disebabkan karena ketidak mampuan dan untuk menjaga kehormatan pihak keluarga laki-laki untuk mewujutkan kesepakatan awal yang menyebabkan kurangnya jumlah mahar yang telah ditentukan dan menyebabkan timbulnhya rasa takut akan malu, dikarenakan mahar yang harus diberikan semestinya 15 gram emas, jadi pihak keluarga perempuan atau calon istri siap untuk menambahkan 5 gram emas agar mahar genap menjadi 15 gram emas.

Sebenarnya dalam hukum islam sendiri mahar yang ditambahkan itu tidak apa-apa, bahkan mahar yang dibayar hutang juga tidak apa-apa, maka mahar yang ditambahkan tidak masalah karena atas dasar kerelaan dari istri dan mahar tersebut menjadi hibah maka suaminya diperbolehkan untuk menggunakan mahar tersebut sebagai penambah saat pelaksanaan ijab dan qabul.

Begitu juga menurut hukum positif, mahar yang ditambahkan tidak apaapa, karena mahar tidak termasuk dalam syarat dan rukun sah nya suatu pernikahan

B. Mahar Fiktif Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Mahar fiktif adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya atau sesuatu yang lain dari kenyataannya yang tidak ada menjadi ada yang kurang di tambahkan.

Menurut hukum Islam dalam pernikahan tidak ada batasan maksimal dalam mahar,tetapi sebaiknya tidaklah berlebihan, bahkan ada hadits yang mengatakan bahwa wanita yang sedikit maharnya lebih banyak berkahnya. Bahkan dalam islam pun masalah jenis barang yang dapat digunakan untuk mahar bisa berupa sesuatu yang dapat dimiliki atau diambil manfaatnya. Mahar bukanlah harga seperti menjual sesuatu, tetapi kaitan moral antara suami, istri dan walinya. ¹

Mahar fiktif ini juga berupa hal yang fiktif atau tidak sesuai atau yang ditambahkan oleh calon istri, mahar yang ditambahkan dan tidak sesuai dengan aslinya atau kenyataannya itulah yang disebut dalam mahar fiktif. Mahar yang ditambahkan oleh calon istri itu sendiri tidak dibolehkan, kebolehan tersebut dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, calon istri melakukan hibah berupa harta atau barang kepada calon suami. Hibah atau pemberian adalah sah dan sunnah dari siapapun datangnya termasuk dari calon istri. Dan calon suami berhak menggunakan harta pemberian itu untuk apapun termasuk untuk membayar mahar pada istrinya saat ijab kabul walaupun harta itu berasal dari calon istri.

¹ Beni Ahmad Saebani Dan Syamul Falah, Hukum *Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal 33

Karena ketika terjadi hibah, dan harta itu sudah berpindah tangan, maka harta itu bukan lagi milik si wanita, tapi 100% milik si laki-laki. Dan ia berhak untuk menggunakan harta itu sepenuhnya. Kedua, mahar itu adalah hak dari istri. Maka, istri boleh memberikannya balik pada suaminya. Dalam QS An-Nisa 4: 4 Allah berfirman:

Artinya: berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.²

Dalam menafsiri ayat ini, Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi hlm. 15/22 menyatakan:

Artinya: Ayat ini secara umum menunjukkan bahwasanya istri boleh memberikan maharnya pada suaminya. Ini pendapat mayoritas ulama.³

Mengenai mahar yg usahakan menjadi 15 gr dimana yg 5 gr penuhi dari pemberian barang pada acara pertunanganan itu tidak mempengaruhi berkurangnya arti mahar pada perkawinan. Sebab setelah barang-barang itu

-

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponogoro, 2009)

³ https://www.tongkronganislami.net/pengertian-hukum-islam/

diberikan pada calon istri dari pihak laki-laki ketika acara pertunanganan adalah resmi milik istri seluruhnya.

Jadi kalau calon istri mau membantu melengkapi mahar suami pada waktu yg kurang 5 gr sebenarnya tidak mengapa sebab calon istri melakukan dengan sadar dan ingin membantu untuk melengkapi kekurangan.

Oleh karena itu dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam disebutkan; "calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak".⁴

Mahar atau mas kawin itu dasarnya adalah kerelaan baik pemberi ataupun yang diberi. Masalah besar kecilnya tidak dipersoalkan dalam syariat, bila tidak memiliki materi, boleh berupa jasa. Misalnya jasa mengajarkan beberapa ayat Al-Quran atau ilmu-ilmu agama lainnya. ⁵

Dalam konsep hukum Islam, mahar bukan merupakan harga dari seorang perempuan yang dinikahi, sebab pernikahan bukanlah akad jual beli. Oleh karenanya, tidak ada ukuran dan jumlah yang pasti dalam mahar, ia bersifat relatif disesuaikan dengan kemampuan dan kepantasan dalam suatu masyarakat. Rasulullah Saw mengajarkan kepada umatnya agar tidak berlebihan di dalam menentukan besarnya mahar.

⁴. Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqhi* (Jakarta: 2002), hal.83

⁵. Hilman Hadikusuma, , *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: 1990) ,hal.75

Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan kesulitan bagi para pemuda yang bermaksud untuk menikah, karena mempersulit pernikahan akan berdampak negatif bagi mereka yang sudah memiliki keinginan untuk menjalankannya.⁶

Jadi yang dimaksud pembahasan tentang *Mahar Fiktif* diatas adalah yang dimana pihak mempelai laki-laki yang memberikan mahar kepada calon istri nya tetapi dianggap tidak pantas atau tidak cukup oleh keluarga pihak calon istri, jadi karena hal itu maka calon istri tersebut menambahkan jumlah mahar yang akan disebutkan ketika pelaksanaan ijab dan qabul. Jadi ketika dalam penyebutan mahar pada saat ijab dan qabul tersebut sepengetahuan masyarakat luas mahar tersebut utuh pemberian suami, dan msyarakat tidak mengetahui bahwa dalam pemberian mahar tersebut telah ditambahkan oleh istrinya itu sendiri.

Dapat di artikan juga maksud dari *Mahar Fiktif* ini sendri yang masalahnya adalah pihak mempelai laki-laki yang memberikan mahar kepada pihak mempelai perempuan atau calon istrinya hanya sebatas emas 10 gr yang dimana 10 gr emas nya telah dipenuhi dari pemberian barang pada acara pertunanganan , tetapi oleh pihak mempelai perempuan tidak menyetujui dikarenakan gengsi, agar pernikahan tetap berjalan maka mempelai perempuan menambahkan mahar tersebut sebanyak 5 gr emas, sehingga genap menjadi 15 gr

⁶. Mahammad Daud Ali, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: 2000), hal. 53.

emas, dan sepengetahuan masyarakat setempat mahar tersebut adalah 15 gr emas.

Mengenai mahar yg diusahakan menjadi 15 gr dimana yg 5 gr di penuhi dari pemberian barang pada acara pertunanganan itu tidak mempengaruhi berkurangnya pemberian mahar pada perkawinan. sebab setelah barang-barang itu diberikan pada calon istri dari calon suami ketika acara pertunanganan adalah resmi milik calon istri seluruhnya. Jadi calon istri ingin membantu melengkapi mahar suami pada waktu yg kurang 5 gr sebenarnya tidak mengapa, sebab perempuan itu melakukannya dengan sadar ingin membantu untuk melengkapi kekurangan. Dan tidak ada yg harus dikhawatirkan tentang sah ataupun tidaknya perkawinan tersebut.

Jadi penyebab terjadinya mahar yang ditambahkan ini karena ketidak mampuan pihak laki-laki memenuhi kesepakatan permintaan mahar yang awalnya telah disepakati dan sehingga menjaga kerukunan keluarga pihak laki-laki. Menurut hukum islam dan hukum positif juga masalah mahar yang ditambahkan itu diperbolehkan, karena mahar tidak termasuk dalam syarat dan rukun sah nya suatu pernikahan.

Oleh karena itu dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

"calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya "disepakati" oleh kedua belah pihak".

Jika kita perhatikan kata "disepakati" dalam pasal tersebut, itu mengandung makna bahwa istri dan suami telah menyetujui untuk melengkapi jumlah mahar menjadi 15 gr emas.

Dalam pembahasan pada bab sebelumnya kita telah membahas tentang hibah, maka pada penulisan ini penulis bermaksud untuk menghubungankan hubungan mahar yang ditambahkan dengan hibah, jika mahar yang ditambahkan dapat dikatakan bila istri memberikannya dengan atas kerelaannya maka itu akan menjadi hibah dari istri untuk suaminya,dan suaminya dapat menggunakkan mahar tersebut. Terdapat salah satu dasar hukum hibah yang berhubungan langsung dengan mahar adalah pada QS an-Nissa ayat 4:

Artinya:"berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan[267]. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya"⁸.

_

⁷ KHI, Pasal 30, Tahun 1974

⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Figh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal.159

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita dengan memberi hak kepadanya diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (mas kawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri kecuali dengan ridlo dan kerelaan san istri.

Para ulama' sepakat bahwa mahar wajib diberikan oleh suami kepada istrinya, baik kontan ataupun dengan cara tempo. Pembayaran mahar harus sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam akad pernikahan dan tidak dibenarkan menguranginya. Jika suami menambahnya, hal itu lebih baik dan sebagai shodaqo, yang dicatat sebagai mahar secara mutlak yang jenis dan jumlahnya sesuai akad nikah.

Mahar dalam kompilasi hukum islam pasal 30 menunjukkan bahwa hal ini berarti ketentuan hukum yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis mengenai berapa besar kadar jumlah maksimal dan jumlah minimal pemberian mahar dari calon mempelai tidak ada ketentuannya. ¹⁰

Dalam pasal 36, 37 dan 38 Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai barang yang dijadikan mahar itu sendiri. Apabila barang yang akan dijadikan mahar itu hilang maka mahar bisa diganti dengan barang yang sama bentuk dan

⁹ Beni Ahmad Saebani, .Fiqh Munakahat (Bandung:Cv Pustaka Setia,2001), Hal.,265-266

¹⁰ Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, 2006,(Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal.

jenisnya tetapi boleh juga diganti dengan barang lain atau dengan uang yang sama nilainya dengan barang tersebut. Namun jika yang terjadi adalah adanya cacat pada barang yang akan dijadikan mahar dan mempelai wanita menolak untuk menerima mahar tersebut karna sebab adanya kecacatan, maka suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Kecuali si calon mempelai wanita bersedia menerima mahar tersebut, maka mahar tidak perlu diganti.

Pasal yang juga sangat penting diperhatikan adalah terdapat di dalam pasal 31 yang berbunyi:

Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. 11

Dengan demikian kendatipun mahar itu wajib, namun dalam penentuannya tetaplah harus mempertimbangkan asas kesederhanaan dan kemudahan. Maksudnya, bentuk dan harga mahar tidak boleh memberatkan calon suami dan tidak pula boleh mengesankan asal ada atau apa adanya, sehingga calon istri tidak merasa dilecehkan atau disepelekan.

¹¹ KHI, Pasal 30 dan 31

BAB V

PENUTUP

Bab penutup merupakan tahap akhir dari serangkaian kegiatan yang penyusun lakukan dengan memberikan gambaran singkat mengenai hasil penelitian yang di dalamnya berisi hasil kesimpulan dan saran.

A. Kesimpulan

 Bahwasannya yang menjadi penyebab terjadinya mahar fiktif ini adalah adanya faktor malu, karena mahar yang telah disepakati dari awal tetapi mendekati hari pernikahan mahar tersebut belum sepenuhnya terkumpul sehingga pihak keluarga calon istri sepakat untuk menambahkan jumlah mahar nya ketika proses ijab dan qabul.

Dalam hukum islam dan hukum positif mahar yang ditambahkan tidak masalah dan tidak menyebabkan batal atau tidak sahnya pernikahan, karena penambahhan tersebut telah menjadi hibah dari istri untuk suaminya.

2. Menurut hukum Islam dan hukum positif mahar yang ditambahkn tidak apa-apa dan tidak akan membatalkan suatu pernikahan seingga mahar yang ditambahkan dari calon istri ini di perbolehkan, karena mahar tidak termasuk dalam syarat dan rukun suatu pernukahan. Mahar juga bermakna pemberian bukan sebagai harga beli, mahar diberikan dari calon suami kepada calon istri. Permintaan

mahar itu sendiri janganlah yang terlalu berlebihan, dan disisi lain wanita janganlah menuntut mahar yang tinggi sehingga memberatkan pria. Anjuran untuk memperkecil bilangan mahar merupakan kemudahan sehingga para pria bisa segera menikah tanpa harus tertunda karena masalah harta untuk pemberian mahar. Jadi, bahwasannya mahar fiktif itu sendiri didalam hukum islam diperbolehkan karena dilakukan atas kesukarelaan dan tidak ada keterpaksaan dalam memberi tambahan pada mahar tersebut. Karena mahar yang ditambahkan juga bisa dikatakan hibah dari istri untuk suami, dan pada dasarnya mahar itu murni hak istri maka istri berhak untuk memberikan maharnya kepada siapapun termasuk kepada suaminya. Hibah ini jug adapt kita buktikan dengan adanya hubungan mahar dengan hibah dalam QS. An- Nissa ayat 4.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap Mahar Fiktif Dalam Pandangan Hukum Islam, penulis mempunyai beberapa saran-saran sebagai berikut:

 Seiring perubahan zaman, maka problem umat semakin kompleks, maka penyelesaian yang arif dan bijaksana, yang diambil dari dasar utama hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah, dan hukum-hukum yang lahir dari keduanya. Bagaimana pun juga dasar hukum Islam yang telah diyakini itu

- sebagai petunjuk dan mampu memberikan jalan keluar dari problem tersebut dan perlu ditafsirkan kembali sesuai dengan kebutuhan umat saat ini.
- Menyesuaikan penentuan mahar dengan kondisi ekonomi diantara kedua mempelai agar tidak terjadi ingkar di antara keduanya serta memperbaiki ketentuan adat yang sudah di tetapkan agar lebih sesuai lagi dengan patokan dan kaidah – kaidah Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Slamet dan Aminudin. 1999 Fiqih Munakahat1, Cet1, Jakarta:Cv Pustaka Setia.

Al-'Askalani, Al-Hafizh bin Hajar. 1989, *Bulugul Mahram*, terj.M. Rifa'i dan A. Quayari misba. Semarang: Wickasana.

Al-Asygar, Umar Sulaiman, Pernikahan Syar'I, Cetl

Ali, Zainudin, 2006, Hukum Islam, Jakarta, Sinar Grafika, Cet 1

Ali, Zainuddin, 2008, *Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet 2

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2009, fiqh munakahat, Jakarta, Amzah

Az-Zuhaili, Wahbah. 2007, Fiqih Islam Wa Adilatuhu, Damaskus: Darul Fikir

Basryir, Ahmad Azhar. Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta, UII ress.

Beni Ahmad Saebani Dan Syamul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 2011, Bandung: Pustaka Setia.

Busriyanti. 2011, Fiqh Pernikahan, Curup: LP2 STAIN

Departemen Agama R.I, 2004, Al-qur'an dan terjemah, Bandung, Jumanatul'ali-Art

Departemen Agama RI, 2006, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang. Karya Thoha Putra.

Departemen Agama RI, 2009, Al-Our'an dan Terjemahnya, Bandung: Diponogoro.

Diponogoro. 2004 *Al-Qur'an dan terjemahan*, Bandung, Lajnah Pantashih Mushaf Al-Qur'an.

Djubaidah, Neng. 2010, Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat,

Jakarta Sinar Grafika

Ghazaly, Abdur Rahman. 2006, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Harahap, Yahya. 2007, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, Jakarta Sinar Grafika

Hadikusuma, Hilman, 1990, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: Mandar Maju

Istibsyaroh. 2004, Hak-Hak Perempuan, Jakarta, Teraju

Khaeruman, Badri, 2010, Hukum Islam, Bandung, Pustaka Setia

Mardani. 2011, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta, Graha Ilmu

Muchsin, 2003, Hukum Islam, Surabaya, Al Ikhlas

Masyhur, Kahar. 1992, Bulughul Maram Buku ke Dua, Jakarta,

Mughniyah, Muhammad Jawad. 2007, Fiqh Lima Madzhab, Jakarta, Penerbit Lentera

Mahammad daud Ali. 2000, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Mustofa, Adib Basri. 1992, Terjemah Sahih Muslim, Semarang: CV Asy Syifa.

Nasiri, 2010, Hebohnya Kawin Misyar, Surabaya, Al Nur

Nurjannah. 2003, Mahar Pernikahan, Yogyakarta, Prima Shopi

Nuruddin, Amir & Azhari Akmal Tarigan. 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana

Rasjidi, 1976, *Hukum Islam Dan Pelaksanaanya Dalam sejarah*. Jakarta, Bulan Bintang

Rofiq, Ahmad. 1995, Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers.

Rusyd, Ibnu. 1990, Tarjamah Bidayatul Mujtahid, Jilid II, Semarang, As-Syifa'

Sabiq, Sayyid Figh Sunnah VI., 1981, Bandung, PT Alma'arif

Shaleh, Qamaruddin. 1996, Asbabun Nuzul, Bandung, CV Diponogoro.

Shihab, Quraish, Tafsir Al-Mishbah, vol.2, Jakarta, Lentara Hati

Syarifuddin, Amir. 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media.

Syarifuddin, Amir. 2009, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta, Kencana

Tihami, M.A. Dan Sohari Sharani, 2012, Fiqh Munakahat (Kajian Fiqh Nikah Lengkap), Jakatra, Rajawali Pers.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2008, Kompilasi Hukum Islam, Bandung, Nuansa Aulia

Umar, Nasaruddin. 1999, *Kodrat Perempuan Dalam Islam,* Jakarta, Lembaga Kajian Agama dan Jender.

Tim Citra Umbara, 2013, Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung, Citra Umbara.



KEMENTERIAN AGAMA RI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP JURUSAN SYARI'AH& EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI Nomor: 01/Sti.02/J.Sy&Ekis/PP.00.9/01/2017 Pada hari ini Senun Tanggal 33 Bulan Jahuor Tahun 2017 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas : Lozauna Perbantan, Syan ah / Syani'ah & Ekonomi Islam Mahar Pitat Dalam Pandangan Hutum Klam Prodi / Jurusan : Judul Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut : Millo Autosi Moderator Calon Pmbb I : H. M. Abu Dzar, Lc. M. H.I Calon Pmbb II : Budi Birahmat , Mis Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut : 1. Mahar fiktif, dilafar belatarg belum duduk + kasusnya, Rumusan masalah fidek bisa bagsung. -Tambahtan finzanan pustaka, footnote. 2. Metodologi, Tehnik anusis dala, dil. Pergerfian Mahar fitht claum penselasan judul. Struktunsasi proposal hans Sestiai dengan pelunjuk. Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak tintuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal bulan tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur. Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Curup. - 33 - Januar - 2017 Calon Pembimbing I Calon Pembimbing II

NB:

Hasil berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua calon pembimbing silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Jurusan Syari'ah & Ekonomi Islam / Pengawas untuk penerbitan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BAB i yang sudah disetujui ACC oleh kedua calon pembimbing.



SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP Nomor: 4)4 /Sti. 02/I/PP.00.9/04/2018

Tentang PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II PENULISAN SKRIPSI

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Menimbang

- Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- 2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang UU Pokok Kepegawaian; 1.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 4. Peraturan pemerintah RI Nomor: 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5. Kepres Nomor: 11 Tahun 1997 Tentang pendirian STAIN Curup;
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 289 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja 6. STAIN Curup;
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 175 Tahun 2008 Tentang STATUTA STAIN Curup; 7.
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.11/3/08207, Tanggal 10 Mei 2016 Tentang Pengangkatan Ketua STAIN Curup Periode 2016 - 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Menunjuk saudara:

Pertama

1. M. Abu Dzar, Lc., M.H.I

NIP. 198110162009121001

2. Budi Birahmat, SHI., MIS

NIP. -

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan Skripsi Mahasiswa:

Reni Rozalina

NIM

13621088

PRODI/JURUSAN

Ahwal Al Syakhsyiyah /Syari'ah & Ekonomi Islam

JUDUL SKRIPSI

Mahar Fiktif dalam Pandangan Hukum Islam

Kedua

Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh STAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan:

Keempat

Ujian Skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal 3 bulan semenjak SK

ini ditetapkan

Kelima

Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

dan kesalahan.

Keenam

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di

: CURUP

Pada tanggal

: 03 April 2018

A.D. KETUA STAIN CURUP Wakil Ketua I,

HENDRA HARMI, M. Pd NIP. 197511082003121001

Tembusan:

- Pembimbing I dan II Bendahara STAIN Curup
- 2. Kasubag AK STAIN Curup

- Kepala Perpustakaan di Curup Arsip/Jurusan Syari'ah STAIN Curup dan yang bersangkutan



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

VAMA	PENI POZALINA
MIN	[\$69,088
JURUSAN/ PRODI	TURUSAN/ PRODI SYAPIAH / AHWAL AL-SYAKHSYIYAH
PEMBIMBING I	M. ABU 02AR, LT, M. H.
PEMBIMBING II	BUD! BIRAHMAT MIS
JUDUL SKRIPSI	MAHAR PIKTIE DALAM PANDANGAN
	HUKUM ISLAM

- * Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
- * Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- * Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan di harapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing di lakukan paling lambat sebelum ujian skripsi



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

HUKUM ISLAM	JUDUL SKRIPSI : MAHAR PICTIF DALAM PANDANSAN	PEMBIMBING II . BUDI BIRAHMAT . MIS	PEMBIMBINGI : M. ASU OZAR : LC: M. H./	JURUSAN/ PRODI : SYAR! AH AHWAL AL -SYAKHSYIYAH	NIM : 1862/088	NAMA RENI ROZALINA
	DALAM PANDANGA,	. M /S	C. M. H.	HAKIKSHNAKS-14 140		

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi STAIN Curup.

Pembimbing I. Apyrama ka prosi Large Stess , MH M PABU 12AP. LE. M-HH NIP. 198110162009121001

mbimbing II,

BUDI BIRAHMAT - MIS

NP.

ço	.7	6.	òı	4	ည	2.	1.	No.	
		80/4/	13/-18	80/	40:	62/-18	16/-18	TANGGAL	
		the bac War	Pertain bas IV	Ace bout if & 10 Coulie	Persone but if the lite	Ace son 5 lanjer	Personal base 2	Hal-hal yang Dibicarakan	
	*	Sweam Ja.	The magnitude	The -sub	March Start	The rame	Just Jeff	Paraf Paraf Pembimbing I Mahasiswa	

in the

								va	
C°	7. 03/2018	6. 08 / 2018	5. 18 rol8	4. 13/208	3. hop 2018	2. log/2018	1. 13 20/ 2018	No. TANGGAL	
	ACC untule ditenstaci	ACC BAR IV	ACC BAB II)	Perbankan 1SAB WIXIX	ACC BAB II	Perbaikan BAB 11	ACC SAB [Hal-hal yang Dibicarakan	
		à	K)	6)	Jo	à	Paraf Pembimbing II	
	F	7	J.	The state of the s	The state of the s	A.	L.	Paraf Mahasiswa	



KEMENTRIAN AGAMA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP

Jalan Dr. AK Gani, No 01 Kotak Pos 108 Telp (0732) 21010 Curup – Bengkulu 39119

K;ARTU DAFTAR KEHADIRAN UJIAN MUNAQASAH/SKRIPSI

NAMA

: Reni Rozalina

NIM

: 13621088

PRODI

: PA

JURUSAN

: Syariah dan Ekonomi Islam

NO	HARI/TGL	Nama Pesarta Ujian Skripsi	Judul Skripsi	Penguji	Tanda Tangan Penguji
1	Selas os 16 Jas/2013	dian guniati	anousis penetapan Medade penelistan harga tual beli murabahah di Bont par sepakar	1. Napričali mag 2. hendpia mo	2
2		ROUDINA AFITA SARI	pengatuh sistem Semput bola dethordap Minat hasabah Menabung di BARSSA FIR Curup	1. ZAINOI OBIFIN SH. MH 2. M. Shou'hin MISI	0
3	Paba 13/05/2019	lilis gustina ucan dei	someon abeleasioners	2. AAH . Apriando (.c. m.u	1. Of 2. Z
4	Rabu 17/05/2017	Coindra Liadi	Wath'i subhert dalam punikahan menuruk Mazhab syapi'i e Hanapi	1. Dr. Yusepri IM. Ag 2. Mabrur (yoh	2.
5				2.	2.
6				1.	1.
				2.	2.

BIODATA PENULIS



A. IDENTITAS DIRI

NAMA : RENI ROZALINA

TEMPAT/TANGGAL LAHIR : CURUP, 11 JULI 1995

ALAMAT : JL. BEO NO. 83 PERUMNAS BATU GALING

KEC. CURUP TENGAH KAB. REJANG LEBONG

NAMAAYAH : SUHEDI.H (ALM)

NAMA IBU : YURNALIS

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD NEGERI 94 KESAMBE LAMA ANGKATAN 2007

2. SMP NEGERI 1 CURUP TIMURANGKATAN 2010

3. SMK NEGERI 1 CURUP TIMURANGKATAN 2013

C. CONTACK PERSON

1. TELPON : 0815-3996-2970 2. FACEBOOK : RENNY BUNGSU 3. INSTAGRAM : @RENIROZALINA